

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

Nyayu Fadilah Fabiany

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi

Email: nyayufadilah24@yahoo.co.id

Abstrak

Penentuan sektor unggulan daerah merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian suatu daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan perekonomian di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sehingga meneliti di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu 17 sektor menurut lapangan usaha dalam PDRB tahun 2016-2020, dan metode penentuan sampelnya adalah sensus. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Tipologi Klassen, gabungan Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Jambi yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kedepannya masing-masing pemerintah daerah harus bisa menjaga stabilitas pertumbuhan dari sektor unggulan tersebut, karena sektor unggulan tersebut merupakan kekuatan dan daya saing daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Kata kunci : sektor unggulan, tipologi klassen, gabungan Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ)

Abstract

Determination of the leading sector of the region is very important as a basis for planning development and improving the economy of a region. The purpose of this research is to find out which sectors are the leading sectors of the economy in regencies/cities in Jambi province, so that research in regencies/cities in Jambi province. The population and sample used are 17 sectors according to business fields in the 2016-2020 GRDP, and the method of determining the sample is the census. This study uses the Klassen Typology data analysis technique, a combination of Location Quotient (LQ) and Dynamic Location Quotient (DLQ). Based on the results of the research, the leading sectors in Jambi Province are the agriculture, forestry and fishery sectors, the manufacturing industry sector, the electricity, gas and clean water sector, the construction sector, the wholesale and retail trade sector, car and motorcycle repairs, the information and communication sector, the real estate sector, the education services sector and the health services sector and social activities. In the future, each local government must be able to maintain the stability of the growth of the leading sector, because the leading sector is the strength and competitiveness of the region in improving the regional economy.

Keywords: leading sector, klassen typology, combination of Location Quotient (LQ) and Dynamic Location Quotient (DLQ)

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan pada saat era reformasi berlalu, yaitu dari sentralisasi ke desentralisasi atau yang sering disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu sistem baru yang memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber yang ada di daerahnya. Menurut Erawati dan Mahaendra Yasa (2012), pelaksanaan otonomi daerah dibebankan pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mandiri didalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan. Kondisi seperti ini akan mampu meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber potensi yang dimiliki daerah, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat akan terminimalisir. Menurut Wulandari dan Ayuningsasi (2014), salah satu cara untuk mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah adalah dengan memperhatikan besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diperoleh oleh suatu daerah.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah, semakin besar PAD maka daerah tersebut semakin mandiri yang ditunjukkan oleh ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang semakin berkurang. Menurut Ayu dan Wiagustini (2016), pemerintah daerah dapat melakukan manajemen pendapatan secara optimal dengan cara mengenali sumber-sumber potensi ekonomi daerah yang mampu menghasilkan pendapatan dan membuat sumber-sumber pendapatan baru. Wilayah metropolitan didefinisikan sebagai suatu wilayah dengan konsentrasi penduduk yang besar, dengan kesatuan ekonomi dan sosial yang terpadu, dan mencirikan aktivitas kota. Wilayah metropolitan memiliki sifat yang strategis, disamping peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat permukiman, pusat kegiatan sosial budaya, umumnya juga sebagai pusat pemerintahan serta aktivitas-aktivitas lainnya (Erawati, 2012).

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi
Jambi Menurut Harga Konstan (persen) Tahun 2018 – 2020

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2018	2019	2020
PROVINSI JAMBI	4,69	4,37	-0,46
KERINCI	4,93	4,23	3,69
MERANGIN	4,93	4,27	0,78
SAROLANGUN	4,80	4,65	-0,26
BATANGHARI	4,83	4,93	-0,27
MUARO JAMBI	5,01	4,95	0,27
TANJUNG JABUNG TIMUR	2,94	4,21	-3,87
TANJUNG JABUNG BARAT	6,77	5,01	-0,64
TEBO	4,98	4,76	-0,04
BUNGO	4,65	4,25	-0,40
KOTA JAMBI	5,30	4,79	-3,28
KOTA SUNGAI PENUH	4,88	5,05	-0,14

2019 : Angka sementara 2020 : Angka sangat sementara Data disajikan termasuk migas

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2020

Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB ketiga kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2018-2020 sebagian besar mampu mengimbangi laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi seperti pada Tabel 1 yaitu pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat laju pertumbuhan PDRB tahun 2018 sebesar 6,77%, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,01%, dan tahun 2020 terjadi penurunan sekitar -0,64%, dari tahun 2018-2020 laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi.

Pada Kota Jambi, laju pertumbuhan PDRB tahun 2018 sebesar 5,30%, tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 4,79%, dan tahun 2020 terjadi penurunan sekitar -3,28%. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,01%, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,95% dan pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan sekitar 0,27%.

Melihat dari hal diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jambi memiliki laju pertumbuhan PDRB yang lebih besar dari PDRB Provinsi Jambi, namun cenderung berfluktuasi, tetapi pada tahun 2020 kabupaten/kota banyak yang mengalami penurunan yang di sebabkan oleh adanya pengaruh dari covid 19.

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jambi (miliar rupiah)
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1. Tanjung Jabung Barat	67.700.000	50.100.000	-6.400.000
2. Kota Jambi	18.661.000,33	19.655.000,79	
	18.918.000,89		
3. Muaro Jambi	50.100.000	49.500.000	2.700.000
Rata-rata	45.253.666,78	39.751.666,93	
5.072.666,96			

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, 2020

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro jambi merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB di Provinsi Jambi, jika dilihat dari perolehan PDRB tahun 2018- 2020. Pada tahun 2020 terlihat PDRB mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi tidak hanya pada beberapa wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro jambi saja, melainkan hamper di seluruh kabupaten di Provinsi Jambi yang disebabkan pada tahun tersebut kita mengalami masa pandemic covid 19.

Dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, memang masih ada yang pertumbuhan PDRB nya dibawah rata-rata. Perbedaan pertumbuhan PDRB tersebut mengindikasikan adanya ketidakmerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, maka dari itu diperlukan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang masih di bawah rata-rata.

Menurut Mahmudi (2009:48), kemampuan untuk mengenali potensi pendapatan dan memanfaatkannya secara optimal bagi manajer publik merupakan suatu hal penting yang

menunjukkan kapasitas *entrepreneurship* mereka dalam mengelola organisasi sektor publik yang dalam hal ini pemerintah daerah harus bisa mengenali sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan di daerahnya masing-masing yang berada di Provinsi Jambi serta nantinya mampu memanfaatkannya secara optimal sehingga akan terwujudnya pemerataan pembangunan daerah di tersebut.

Menurut Arsyad (2015), cara yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu perekonomian terkait dengan potensi ekonomi daerah adalah dengan menggunakan alat analisis *Shift Share*, *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), *Overlay*, dan Tipologi Klassen.

Menurut Mahmudi (2009:52), analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah, dimana dalam analisis ini sektor-sektor perekonomian yang terdapat di suatu daerah akan diklasifikasikan menjadi empat katagori yaitu, sektor unggulan, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang.

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memisahkan suatu sektor perekonomian apakah termasuk kedalam sektor basis atau bukan basis (Mack dan David, 1996). Analisis LQ ini juga merupakan suatu pendekatan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah atau pengujian terhadap sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam katagori sektor unggulan (Ayu & Wiagustini, 2016).

Menurut Sabar (2015), analisis *Overlay* digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan alat analisis dengan tujuan untuk menyaring hasil analisis yang paling baik. Metode ini menghasilkan penilaian terhadap sektor – sektor ekonomi dengan melihat nilai positif (+) dan negatif (-). Sektor yang jumlah nilai positif (+) paling banyak, maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan sebaliknya jika suatu sektor tidak mempunyai nilai positif berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menganalisis tentang penentuan sektor unggulan atau potensi ekonomi daerah menggunakan berbagai alat analisis yang mampu menghasilkan hasil yang serupa, seperti yang dilakukan oleh Erawati dan Mahendra Yasa (2012) yang meneliti tentang Kabupaten Klungkung dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient* (LQ), analisis MRP, analisis *Overlay*, dan Rasio Penduduk Pengerjaan. Hasil dari pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dalam periode tahun 2008-2010 menurut Tipologi Klassen termasuk dalam klasifikasi daerah makmur yang sedang menurun (potensial tertinggal), sedangkan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Klungkung dalam periode tahun 2008-2010 yaitu sektor bangunan dan sektor jasa-jasa, dan dari sektor jasa-jasa, sub sektor yang lebih dominan menyumbang kontribusi yaitu dari jasa swasta.

Yusral dkk. (2015) meneliti Kota Jambi pada tahun 2015 dengan menggunakan empat alat analisis seperti Tipologi Klassen, *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, dan analisis *Overlay*. Berdasarkan gabungan dari tiga alat analisis menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan dengan kriteria tergolong ke dalam sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (kuadran I), sektor basis ($LQ > 1$) dan kompetitif (nilai P dan D positif), yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Dearlinasinaga (2015) meneliti tentang analisis penentuan sektor ekonomi unggulan terhadap pembentukan PDRB di Simalungun pada tahun 2005-2011 dengan alat analisis Tipologi Klassen dan LQ. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, yang merupakan

sektor unggulan di Simalungun adalah sektor jasa dan berdasarkan hasil analisis LQ yang merupakan sektor basis adalah sektor jasa.

Kesuma dan Suyana Utama (2015) meneliti tentang Kabupaten Klungkung tahun 2008-2012 dengan alat analisis LQ dan Shift Share. Berdasarkan hasil perhitungan LQ dan *Shift Share*, yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Klungkung adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa.

Ayu dan Wiagustini (2016) meneliti tentang potensi ekonomi daerah Provinsi Bali dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sektor unggulan yang sama di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2012-2015 adalah sektor konstruksi, sektor berkembang adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor potensial adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor terbelakang adalah sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang; sektor pengadaan listrik dan gas.

Berdasarkan fenomena yang dialami oleh beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jambi maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: sektor – sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Manfaat teoritis penelitian ini nantinya diharapkan mampu menghasilkan bukti empiris tentang sektor – sektor yang menjadi sektor unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Bagi pemerintah daerah yaitu sebagai masukan, bahan pertimbangan, dan petunjuk untuk mengambil suatu keputusan maupun strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan dan mengelola perekonomian daerahnya masing – masing.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Sektor Unggulan

Sektor unggulan perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri atau karakteristik dari suatu perekonomian (Deptan, 2005). Kebijakan ekonomi saat ini pengembangannya diarahkan pada sektor ekonomi unggulan yang erat dengan kepentingan masyarakat luas dan terkait dengan potensi masyarakat serta sekaligus sesuai dengan sumberdaya ekonomi lokal.

Peranan sektor unggulan semakin strategis, karena merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap perolehan devisa. Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah, diantaranya : pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi; kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relative besar; ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik kedepan maupun kebelakang; keempat, dapat juga di artikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Sambodo dalam Usya, 2006).

2.2. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (*Turnpike*)

Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (TPJC) atau *turnpike* diperkenalkan oleh Samuelson (1986). Pada intinya teori ini menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor

ataupun komoditas apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki comparative advantage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat memproduksi dalam waktu relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cepat besar. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan daerah tersebut.

2.3. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dengan memperhitungkan unsur inflasi dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar dan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun dengan tidak memperhitungkan unsur inflasi. PDRB di Indonesia pada umumnya terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, bangunan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. (BPS, 2020).

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (Provinsi/Kabupaten/Kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (*leading sector*) di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah suatu sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita berarti semakin tinggi kekayaan daerah (*region prosperity*) tersebut, dengan kata lain nilai PDRB perkapita dianggap merefleksikan tingkat kekayaan daerah (Tadjoedin, Suharyo, & S, 2001).

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Nazir (2014) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Lokasi atau ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan dipilihnya ketiga Kabupaten/Kota ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah terkait dengan pengoptimalan pengelolaan sektor-sektor ekonomi yang dimilikinya mengingat juga ketiga kabupaten/kota ini merupakan kawasan Kabupaten/Kota yang

memiliki luas wilayah cukup luas, dimana memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDRB Provinsi Jambi. Objek pada penelitian ini adalah 17 sektor dalam PDRB dari ketiga kabupaten/kota di Provinsi Jambi atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2018 – 2020.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi *nonparticipant* dan jenis data yang digunakan terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu berupa artikel dari penelitian-penelitian sebelumnya dan profil dari ketiga kabupaten/kota di Provinsi Jambi, sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

1. Data PDRB Provinsi Jambi dan BPS dari masing-masing Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2018 – 2020
2. Data PDRB secara sektoral Provinsi Jambi dan BPS dari masing-masing Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2018-2020
3. Laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan masing-masing sektor PDRB Provinsi Jambi dan BPS dari masing-masing Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang dimana data-data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari data PDRB Provinsi Jambi, PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PDRB Kota Jambi, PDRB Kabupaten Muaro Jambi atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2018-2020 yang didapat dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, website Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, website Badan Pusat Statistik Kota Jambi, dan website Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi. Teknik analisis yang digunakan yaitu Tipologi Klassen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Klasifikasi Tipologi

Klassen Menurut Sjafrizal (1997) Klassen Tipologi digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Daerah yang diamati akan dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High growth and high share*), daerah maju tapi tertekan (*High growth but low share*), daerah berkembang cepat (*High share but low growth*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low share*).

Tabel 3
Klasifikasi Sektor PDRB Menurut Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan	Kontribusi	
	$Y_{ik} > Y_i$	$Y_{ik} < Y_i$
$r_{ik} > r_i$	Kuadran I sektor maju dan cepat tumbuh ($r_{ik} > r_i$ dan $Y_{ik} > Y_i$)	Kuadran II sektor maju tapi tertekan ($r_{ik} > r_i$ dan $Y_{ik} < Y_i$)
$r_{ik} < r_i$	Kuadran III sektor potensial tapi masih bisa berkembang ($r_{ik} < r_i$ dan $Y_{ik} > Y_i$)	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal ($r_{ik} < r_i$ dan $Y_{ik} < Y_i$)

Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut.

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I)
2. Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II)
3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III)
4. Sektor relatif tertinggal (Kuadran IV)

Tabel 4
Rekapitulasi Tipologi Klassen Sektor dan Sub Sektor Perekonomian
di Provinsi Jambi Tahun 2018-2020

No.	Sektor dan Sub Sektor	Kuadran
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Kuadran 2
2.	Pertambangan dan Penggalian	Kuadran 4
3.	Industri Pengolahan	Kuadran 3
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	Kuadran 1
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Kuadran 3
6.	Konstruksi	Kuadran 1
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Kuadran 1
8.	Transportasi dan Pergudangan	Kuadran 4
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Kuadran 4
10.	Informasi dan Komunikasi	Kuadran 4
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	Kuadran 3
12.	<i>Real Estate</i>	Kuadran 1
13.	Jasa Perusahaan	Kuadran 3
14.	Adm Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	Kuadran 3
15.	Jasa Pendidikan	Kuadran 2
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Kuadran 2
17.	Jasa Lainnya	Kuadran 3

Selain itu tiga sektor yang tergolong dalam kategori sektor maju tapi tertekan adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor jasa Pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Empat sektor yang tergolong dalam klasifikasi sektor yang relatif tertinggal yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor informasi dan komunikasi. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun, memiliki kontribusi yang rendah yaitu, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, dan sektor real estate. Pertumbuhan tinggi ini sejalan dengan program pemerintah daerah yang di tentukan.

4.2. Sektor Basis dan Non Basis

4.2.1. Location Question (LQ)

Teori *Location Question*, seperti dikemukakan Bendavid (1991), digunakan untuk menganalisis keragaman basis ekonomi. Berdasarkan analisis tersebut dapat diidentifikasi

sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan untuk tujuan sektor dan tujuan menyuplay kebutuhan lokal, sehingga sektor yang dikatakan potensial dapat dijadikan sektor prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi.

Menurut Sjafrizal (2008) Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non-basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau *service industries*.

Kriteria pengukuran nilai LQ yang dihasilkan sebagai berikut:

1. $LQ > 1$ = berarti laju pertumbuhan sub sektor i di daerah studi k adalah lebih besar bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sub sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sub sektor p merupakan sub sektor basis untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k (Basis)
2. $LQ < 1$: berarti laju pertumbuhan sub sektor i di daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sub sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi i. Dengan demikian, sub sektor i bukan merupakan sektor basis (Non Basis)
3. $LQ = 1$: berarti laju pertumbuhan sub sektor i di daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sub sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p (Tetap)

Adapun asumsi yang digunakan dalam analisis *Location Quotient* (LQ) adalah sebagai berikut :

1. Penduduk di wilayah bersangkutan memiliki pola permintaan wilayah yang sama dengan pola permintaan nasional.
2. Permintaan wilayah akan suatu barang akan terpenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

Tabel 5
Hasil Analisis LQ Sektor dan Sub Sektor Perekonomian di Provinsi Jambi
Tahun 2018-2020

No.	Sektor dan Sub Sektor	Rata-rata LQ	Keterangan
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,70	Basis
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,24	Non Basis
3.	Industri Pengolahan	1,72	Basis
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,70	Basis
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,60	Non Basis
6.	Konstruksi	1,82	Basis
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,50	Basis
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,13	Non Basis
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,40	Non Basis
10.	Informasi dan Komunikasi	0,78	Non Basis
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	Tetap
12.	<i>Real Estate</i>	2,05	Basis

13.	Jasa Perusahaan	1,50	Tetap
14.	Adm Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,02	Tetap
15.	Jasa Pendidikan	1,56	Basis
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,87	Basis
17.	Jasa Lainnya	0,78	Non Basis

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan analisis LQ bahwa ada delapan sektor perekonomian yang tergolong sektor basis di Provinsi Jambi yaitu,

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Industri Pengolahan
3. Listrik, Gas dan Air Bersih
4. Konstruksi
5. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6. *Real Estate*
7. Jasa Pendidikan
8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

4.2.2. Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk menentukan reposisi sektor dan sub sektor ke depan di daerah tertentu. Analisis ini penting digunakan untuk mengetahui apakah di masa yang akan datang sektor dan sub sektor tertentu dapat bertahan sebagai sektor dan sub sektor basis atau tidak dan sebaliknya apakah sektor dan sub sektor yang sebelumnya bukan basis dapat mengalami reposisi/berpotensi menjadi sektor dan sub sektor basis di masa yang akan datang.

Tabel 6
Hasil Analisis DLQ Sektor dan Sub Sektor Perekonomian di Provinsi Jambi
Tahun 2018-2020

No.	Sektor dan Sub Sektor	Rata-rata DLQ	Keterangan
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,20	Basis
2.	Pertambangan dan Penggalan Basis	0,50	Non
3.	Industri Pengolahan	1,01	Basis
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,80	Basis
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Basis Limbah dan Daur Ulang	0,78	Non
6.	Konstruksi	1,82	Basis
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,50	Basis

8.	Transportrasi dan Pergudangan Basis	0,45	Non
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Basis	0,85	Non
10.	Informasi dan Komunikasi Basis	0,23	Non
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	Tetap
12.	<i>Real Estate</i>	1,36	Basis
13.	Jasa Perusahaan	1,50	Tetap
14.	Adm Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,02	Tetap
15.	Jasa Pendidikan	1,78	Basis
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,57	Basis
17.	Jasa Lainnya Basis	0,58	Non

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa sembilan sektor pembentuk PDRB Provinsi Jambi merupakan sektor basis yang dapat diharapkan di masa yang akan datang karena memiliki nilai rata-rata DLQ > 1, jika diurutkan dari nilai rata-rata DLQ terbesar sampai terkecil ialah sektor konstruksi yang memiliki nilai rata-rata DLQ terbesar yaitu (1,82) dan sektor industri pengolahan merupakan sektor basis dengan nilai rata-rata DLQ terkecil yaitu (1,01). Sedangkan sektor transportrasi dan pergudangan merupakan sektor yang tidak dapat diharapkan di masa yang akan datang karena nilai rata-rata DLQ kurang dari 1 (DLQ < 1) sehingga sektor ini tergolong sektor non basis.

Hasil penelitian ini ada yang sejalan dan ada yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Cholid, I (2012) yang menyatakan bahwa terdapat enam sektor yang diproyeksikan dapat diharapkan menjadi sektor basis dimasa yang akan datang yaitu sektor adalah sektor listrik, gas, dan air minum, sektor jasa-jasa, sektor bangunan/konstruksi, sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

4.2.3. Gabungan LQ dan DLQ

Penentuan sektor dan sub sektor basis saat ini dan dimasa yang akan datang dapat digunakan dengan metode analisis gabungan LQ dan DLQ. Hasil analisis gabungan LQ dan DLQ yang menunjukkan nilai LQ non basis dan pada nilai DLQ basis, berarti sektor tersebut mengalami reposisi menjadi sektor basis di masa yang akan datang (reposisi basis). Sebaliknya, jika nilai LQ basis dan pada nilai DLQ non basis, maka dapat diartikan sektor tersebut mengalami reposisi menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang (reposisi non basis). Jika nilai LQ basis dan pada nilai DLQ menunjukkan basis berarti sektor tersebut tidak mengalami reposisi atau tetap basis saat ini dan masa yang akan datang. Namun jika nilai LQ menunjukkan non basis dan pada nilai DLQ menunjukkan non basis, maka sektor tersebut tidak mengalami reposisi atau non basis saat ini dan pada masa yang akan datang.

4.3. Penentuan Sektor Unggulan

Untuk menentukan sektor unggulan dengan mengacu kepada dua alat analisis yang telah dilakukan yaitu dari hasil perhitungan gabungan LQ dan DLQ dan Tipology Klassen maka dapat dilakukan dengan melihat *overlay* (gabungan) kedua analisis tersebut. Koefisien dari kedua komponen tersebut juga harus disamakan dimana disini diberi tanda positif (+) dan negatif (-). Identifikasi *overlay* tersebut jika keduanya positif (++) maka dikatakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Provinsi Jambi. Hasil Analisis *Overlay* dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Analisis *Overlay* (Tipologi Klassen dan DLQ) Sektor dan Sub Sektor Perekonomian di Provinsi Jambi Tahun 2018-2020

No.	Sektor dan Sub Sektor	Tipologi Kalassen	Gabungan (LQ dan DLQ)	Keterangan
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Unggulan	+	+	
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	Non Unggulan
3.	Industri Pengolahan Unggulan	+	+	
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih Unggulan	+	+	
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Unggulan	-	-	Non
6.	Konstruksi Unggulan	+	+	
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Unggulan	+	+	
8.	Transportasi dan Pergudangan Unggulan	-	-	Non
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Unggulan	-	-	Non
10.	Informasi dan Komunikasi Unggulan	+	+	
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi Unggulan	+	+	
12.	<i>Real Estate</i> Unggulan	+	+	
13.	Jasa Perusahaan Unggulan	+	+	
14.	Adm Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	+	+	

16. Jasa Pendidikan Unggulan	+	+	
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Unggulan	+	+	
18. Jasa Lainnya Unggulan	-	-	Non

Berdasarkan Tabel 7 yaitu analisis *Overlay* menunjukkan sektor yang memenuhi kriteria analisis *Overlay* yaitu memiliki koefisien Positif (+ +) dari kedua alat analisis tersebut yaitu :

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Sektor Industri Pengolahan
3. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
4. Sektor Konstruksi
5. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6. Sektor Informasi dan Komunikasi
7. Sektor *Real Estate*
8. Sektor Jasa Pendidikan
9. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Berdasarkan analisis input-output dalam penelitian Firman dan Rahayu, (2006) menyatakan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa subsektor peternakan di Jawa Barat mempunyai nilai keterkaitan tidak langsung kebelakang dan kedepan masing-masing sebesar 0,8356 dan 0,9176. Sedangkan Propinsi Jawa Tengah mempunyai nilai sebesar 0,8231 dan 1,1024. Berdasarkan nilai keterkaitan tersebut dapat dibuktikan tingkat persaingan subsektor peternakan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya berdasarkan dampak penyebaran. Hasilnya menunjukkan bahwa subsektor peternakan hanya menjadi sektor yang mendapat prioritas ke IV dalam pembangunan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor peternakan belum menjadi sektor unggulan di Jawa Barat. Bila kita melihat persaingan antar wilayah, khususnya Jawa Tengah, sub sektor peternakan menempati prioritas ke II dalam pembangunan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa subsektor peternakan belum menjadi sektor unggulan bagi ke dua propinsi tersebut, namun subsektor ini mempunyai potensi untuk terus dikembangkan.

Peneliti lain yang menyatakan bahwa sub sektor peternakan merupakan sub sektor andalan dalam pengembangan wilayah adalah Siagian (2011). Dengan hasil penelitian sebagai berikut: hasil suatu penelitian tentang peranan usaha peternakan dengan pola kemitraan PIR ayam ras pedaging dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa indeks LQ (Location Quotient) > 1 yang berarti bahwa eksistensi usaha peternakan termasuk kegiatan usaha berbasis di dalam peningkatan pendapatan (Produk Domestik Regional Bruto) di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian usaha peternakan dengan pola kemitraan PIR di Kabupaten Deli Serdang menjadi andalan dalam pembangunan wilayah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menganalisis sektor unggulan perekonomian daerah berdasarkan sektor, karena subsektor dari masing-masing komoditi sektor tidak dapat diketahui dengan jelas yang menjadi sektor unggulan daerah tersebut.

2. Perhitungan subsektor tersebut dapat digunakan untuk memperkuat interpretasi atau pembahasan dari hasil penelitian.
3. Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis sektor unggulan perekonomian daerah dengan menggunakan subsektor dari komoditi masing-masing sektor yang terdapat dalam PDRB.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh adalah bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis sektor unggulan perekonomian daerah dengan menggunakan subsektor dari sektor yang terdapat dalam PDRB. Bagi pemerintah daerah di Provinsi Jambi diharapkan mampu mengelola secara optimal sektor yang menjadi unggulan tanpa mengabaikan sektor lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almulaibari, Hilal. 2011. Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 2004-2008. *Skripsi publikasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arsyad, Lincoln. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ke 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aryanti, Eni dan Iin Indarti. 2009. Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Eko Widya Manggela*.
- Aswandi, H, dan Kuncoro, M, 2002, Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Struktur Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 17 (1), hal.27-45.
- Barro, Robert J. 1991. Economic Growth in A Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106 (2), pp.407-433.
- Carlin, Wendy and Colin Mayer. 2003. Finance, Investment and Growth. *Journal of Financial Economics*, 69 (1), pp.191-226.
- Dearlinasinaga. 2015. Determination Analysis of Leading Economic Sector Against Forming Region GDP in Simalungun. *International Journal of Innovative Research in Management*, 4 (3), pp.1-12.
- Erawati, dan Mahaendra Yasa. 2012. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 1 (1), hal.41-61.